**PROPOSAL**

**KOMPETISI INOVASI KOTA PONTIANAK 2024**

| **No** | **Indikator** | **Jawaban** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama unit kerja | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2. | Narahubung | - |
| 3. | Nomor Ponsel narahubung | - |
| 4. | Email narahubung | - |
| 5. | Judul inovasi | Optimalisasi Prosedur Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Kas APBD Pemerintah Kota Pontianak Melalui APLIKASI SIMAKDA PENATAUSAHAAN ” BENDAHARA UPLOAD DOKUMEN ” ( e-BUD) |
| 6. | Tanggal mulai inovasi | 31 Agustus 2022 |
| 7. | Kategori inovasi | Keuangan |
| 8. | Bukti tautan inovasi | [BUD](https://drive.google.com/drive/folders/18wl_Csdat0mRYg3DQ6vf3JlrtsjJB73F?usp=drive_link) |
| 9. | Tautan video inovasi | [inovasi.mp4](https://drive.google.com/file/d/10i08y8IrUJBuibShWDDu75g_WsF7rsfu/view?usp=drive_link) |
|  |  |  |
| 10. | Ringkasan  (0%) | Salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan adalah terciptanya good governance melalui pengelolaan keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan/penatausahaan, pengendalian dan pertanggungjawaban APBD. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pada pasal 7 ayat 2 huruf f menjelaskan bahwa tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diemban oleh Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menetapkan anggaran kas dan SPD APBD Kota Pontianak. Terobosan inovasi dalam proses melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pengelolaan anggaran kas dalam memenuhi tugas dan fungsi Subbid Pengelolaan Anggaran Kas, SPD dan SP2D dan sesuai dengan hasil analisa melalui diagram fishbone dan metode skala likert yaitu Urgency, Seriousness dan Growth (USG) diperoleh gagasan yang diusulkan adalah inovasi optimalisasi prosedur pelaksanaan pergeseran anggaran kas APBD melalui aplikasi Simakda penatausahaan Bendahara Upload Dokumen. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah 11-30. Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring. Inovasi ini berdampak pada efisiensi dan efektivitas pengajuan pergeseran anggaran kas. Dalam rangka menerapkan pengelolaan penatausahaan keuangan yang efisien dan efektif guna peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi salah satu isu strategis pada rencana strategis perubahan Badan Keuangan Daerah dapat melalui proses-proses kegiatan dari pelaksanaan penatausahaan APBD. Pada Subbid pengelolaan anggaran kas, SPD dan SP2D Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pengelolaan anggaran kas. |
| 11. | Latar belakang dan tujuan  (10%) | Salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan adalah terciptanya good governance melalui pengelolaan keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan/penatausahaan, pengendalian dan pertanggungjawaban APBD. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pada pasal 7 ayat 2 huruf f menjelaskan bahwa tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diemban oleh Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menetapkan anggaran kas dan SPD APBD Kota Pontianak.  Hal ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan APBD secara realtime untuk kepentingan pengguna baik sebagai penentu dalam mengambil kebijakan strategis dalam pengolahan data untuk proyeksi penganggaran kedepannya, dalam hal pembiayaan maupun untuk kepentingan audit. Penyajian tentang pelaksanaan penatausahaan APBD diawali dengan penyusunan dan pengelolaan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD bendahara atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Ketentuan Penyusunan pergeseran anggaran dan anggaran kas sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bendahara Umum Daerah dalam hal ini yaitu Badan Keuangan Daerah menyiapkan dan menetapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD.  Hal ini dapat mempengaruhi didalam penyusunan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD Kota Pontianak setiap bulannya secara tepat waktu dikarenakan belum bisa dilakukan Verifikasi, evaluasi dan monitoring oleh PPKD terhadap pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.  Hambatan ini ini disebabkan oleh belum memadainya pelaksanaan pengendalian APBD sebagaimana yang dituangkan didalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan PPKD dalam hal ini Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam rangka menerapkan pengelolaan penatausahaan keuangan yang efisien dan efektif guna peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi salah satu isu strategis pada rencana strategis perubahan Badan Keuangan Daerah dapat melalui proses-proses kegiatan dari pelaksanaan penatausahaan APBD. Pada Subbid pengelolaan anggaran kas, SPD dan SP2D Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pengelolaan anggaran kas. |
| 12. | Kebaruan/pokok perubahan  (15%) | Terobosan inovasi dalam proses melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pengelolaan anggaran kas dalam memenuhi tugas dan fungsi Subbid Pengelolaan Anggaran Kas, SPD dan SP2D dan sesuai dengan hasil analisa melalui diagram fishbone dan metode skala likert yaitu Urgency, Seriousness dan Growth (USG) diperoleh gagasan yang diusulkan adalah inovasi optimalisasi prosedur pelaksanaan pergeseran anggaran kas APBD melalui aplikasi Simakda penatausahaan Bendahara Upload Dokumen.  Inovasi ini berdampak pada efisiensi dan efektivitas pengajuan pergeseran anggaran kas. Sebelumnya, ada banyak kelengkapan berkas yang harus dipenuhi OPD untuk menggeser angkas mereka, namun dengan adanya inovasi ini, mereka cukup mengirimkan berkas pergeseran ke dalam sistem. Selain itu dari sisi waktu, biasanya butuh dua hari untuk memproses pergeseran, kini hanya butuh hitungan jam. Dari sisi prosedur, berkas pun tak perlu dicetak dan diantarkan sehingga menghemat waktu. Pengembangan inovasi ini tak merepotkan karena menjadi tambahan dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akutansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) Kota Pontianak. |
| 13. | Implementasi inovasi (5%) | 1. Regulasi Inovasi Daerah, Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah, melalui Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan 2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah lebih dari 30, Dibuktikan dengan Keputusan atau Penugasan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPTD/Pimpinan Organisasi pada tahun penerapan 3. Dukungan Anggaran, Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi, Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2 4. Alat kerja dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan, Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring 5. Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut : 6. **Manual**, seperti: tatap muka 7. **Hotline**, seperti: layanan email/telp; 8. **Media Sosial**, seperti: grup whatsapp, 9. **Layanan Online**, melalui website/web-aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios).   **Manfaat yang diperoleh :**   1. Manfaat bagi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Pelaksanaan pergeseran anggaran kas APBD Pemerintah Kota Pontianak secara sistematis dan sesuai ketentuan. 2. Manfaat bagi SKPD dan Bendahara dilingkungan Pemerintah Kota PontianakTerpenuhinya standarisasi dalam pengajuan pergeseran anggaran kas terhadap pelaksanaan penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. |
| 14. | Signifikansi/dampak inovasi (30%) | Bendahara Umum Daerah dalam hal ini yaitu Badan Keuangan Daerah menyiapkan dan menetapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD. Hal ini dapat mempengaruhi didalam penyusunan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD Kota Pontianak setiap bulannya secara tepat waktu dikarenakan belum bisa dilakukan Verifikasi, evaluasi dan monitoring oleh PPKD terhadap pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Hambatan ini ini disebabkan oleh belum memadainya pelaksanaan pengendalian APBD sebagaimana yang dituangkan didalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan PPKD dalam hal ini Bendahara Umum Daerah (BUD). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:  1. Belum optimalnya proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah.  2. Kurangnya pemahaman SKPD dalam hal ini khususnya pihak-pihak yang terkait dalam tata kelola keuangan daerah yang mengakibatkan masih terjadinya pergeseran anggaran kas diluar ketentuan.  Dalam rangka menerapkan pengelolaan penatausahaan keuangan yang efisien dan efektif guna peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi salah satu isu strategis pada rencana strategis perubahan Badan Keuangan Daerah dapat melalui proses-proses kegiatan dari pelaksanaan penatausahaan APBD. Pada Subbid pengelolaan anggaran kas, SPD dan SP2D Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pengelolaan anggaran kas. Terobosan inovasi dalam proses melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pengelolaan anggaran kas dalam memenuhi tugas dan fungsi Subbid Pengelolaan Anggaran Kas, SPD dan SP2D dan sesuai dengan hasil analisa melalui diagram fishbone dan metode skala likert yaitu Urgency, Seriousness dan Growth (USG) diperoleh gagasan yang diusulkan adalah inovasi optimalisasi prosedur pelaksanaan pergeseran anggaran kas APBD melalui aplikasi Simakda penatausahaan Bendahara Upload Dokumen. Inovasi ini berdampak pada efisiensi dan efektivitas pengajuan pergeseran anggaran kas. Sebelumnya, ada banyak kelengkapan berkas yang harus dipenuhi OPD untuk menggeser angkas mereka, namun dengan adanya inovasi ini, mereka cukup mengirimkan berkas pergeseran ke dalam sistem. Selain itu dari sisi waktu, biasanya butuh dua hari untuk memproses pergeseran, kini hanya butuh hitungan jam. Dari sisi prosedur, berkas pun tak perlu dicetak dan diantarkan sehingga menghemat waktu. Pengembangan inovasi ini tak merepotkan karena menjadi tambahan dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akutansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) Kota Pontianak. |
| 15. | Adaptasi (20%) | Apakah inovasi ini sudah direplikasi?  ● Belum |
| Salah satu isu-isu strategis pelayanan yang perlu diatasi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yaitu Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan. Hal ini berdampak kepada terkendalanya Pelaksanaan APBD yang dilakukan SKPD mengalami keterlambatan Berdasarkan analisis permasalahan diperoleh masalah utama yaitu: “Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam pelaksanaan penatausahaan pergeseran anggaran kas APBD belum optimal. Pelaksanaan APBD yang dimaksud merupakan rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari sisi penatausahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyajian laporan realisasi belanja yang menjadi kewenangan Kuasa BUD. Dalam menghasilkan laporan realisasi belanja diperlukan suatu sistem atau prosedur yang mengatur adanya proses alur dokumen , validasi dan otorisasi sehingga diperlukan adanya alternatif suatu sistem dan prosedur yang mengakomodir hal tersebut dan merupakan alternatif pemecahan masalah yang akan mengarah kepada ‘Area Perubahan’ bagi aksi perubahan ini.  Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan Optimalisasi Prosedur Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Kas APBD Melalui Aplikasi Simakda Penatausahaan ”Bendahara Upload Dokumen”e-BUD dapat disimpulkan bahwa :  1. Prasarana untuk Optimalisasi Prosedur Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Kas APBD Melalui Aplikasi Simakda Penatausahaan ”Bendahara Upload Dokumen”e-BUD secara sistem sudah terpenuhi.  2. Dukungan dari seluruh tim efektif dan stakeholder merupakan faktor yang terpenting dalam terlaksananya Optimalisasi Prosedur Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Kas APBD Melalui Aplikasi Simakda Penatausahaan ”Bendahara Upload Dokumen”e-BUD. |
| 16. | Strategi keberlanjutan (15%) | Strategi keberlanjutan inovasi, terdiri dari:   * PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 57 TAHUN 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kota Pontianak * Strategi yang dilakukan sebagai berikut:  1. Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir), Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah bahkan lebih melalui Pemberitahuan Pengajuan Pergeseran Anggaran Kas harus melalui Aplikasi Simakda Pergeseran Anggaran Kas 2. Membuat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.  * Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah terbagi menjadi 2 yaitu Internal bagi Badan keuangan Daerah pergeseran anggaran kas lebih terkelola dengan baik dan paperless sehingga pekerjaan juga menjadi lebih efektif dan effiesien dengan adanya SOP pergeseran anggaran kas dan Aplikasi simakda bendahara upload Dokumen e BUD (Kepala Badan Keuangan Daerah, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Kasubbag Umpar BKD, Staf Pengelolaan Anggaran kas, SPD dan Sp2D, dan Tim IT BKD) dan Eksternal dari beberapa SKPD yang telah melakukan ujicoba maka memberikan manfaat yaitu kemudahan dalam melakukan pergeseran anggaran kas dengan tersedinya aplikasi pergeseran anggaran kas sehingga tidak melalui prosedur yang lama serta dapat mengurangi kertas/paperless dan menghemat waktu (Pengguna Anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak, PPTK SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Kasubbag Keuangan dan Perencanaan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Bendahara SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, dan MURFA). |